

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOJONEGORO  
(Studi Tentang Perencanaan RTRK di Kecamatan Kota Bojonegoro)

Oleh  
Lukman Arief  
Adm.Publik FISIP-UPN"Veteran" Jatim

ABSTRACT

This research use method of descriptive with approach qualitative which executed in region district of town of Bojonegoro with one independent variable that is planning. Technique data collecting the used is observation, interview and withdrawal of conclusion.

In this research the problems is how execution of planning of development in Bojonegoro through planning of development of region through town planology plan covering stipulating of exploiting of town room, ready and make-up of public facility and planning of transportation. Second focus is to know and depict phases planning of town planology ( RTRK) Bojonegoro. Result of from this research indicate that policy of planning of town planology in District of Bojonegoro, covering planning of housing environment, planning of commerce environment, planning of transportation and planning of town utility. Some existing facility still need correction, either from facet of quality of and also amount facet is and also required by effort arrangement of better location again. And if seen from phases making of Plan Room Town have precisely because have entangled entire/all elements ( society, governmental and private sector).

Keyword : environmental of housing, planning of commerce environment, planning of transportation and planning of town utility

INTISARI

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro dengan satu variabel bebas yaitu perencanaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Bojonegoro melalui perencanaan pembangunan wilayah melalui rencana tata ruang kota yang meliputi penetapan pemanfaatan ruang kota, penyediaan dan peningkatan fasilitas umum dan perencanaan transportasi. Fokus yang kedua adalah mengetahui dan menggambarkan tahap-tahap perencanaan tata ruang kota (RTRK) Bojonegoro.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perencanaan tata ruang kota di Kecamatan Bojonegoro, meliputi perencanaan lingkungan perumahan, perencanaan lingkungan perdagangan, perencanaan transportasi dan perencanaan utilitas kota. Beberapa fasilitas yang ada masih memerlukan pembenahan, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas serta dibutuhkan upaya pengaturan lokasi yang lebih baik lagi. Dan jika dilihat dari tahap-tahap pembuatan Rencana Ruang Kota sudah tepat karena sudah melibatkan seluruh elemen-elemen (masyarakat, pemerintah dan swasta).

Kata kunci : lingkungan perumahan, perencanaan lingkungan perdagangan, perencanaan transportasi dan perencanaan utilitas kota

## PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil dan spiritual diperlukan pembangunan secara menyeluruh. Pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan baik kesehatan, perekonomian, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Pembangunan juga harus dilakukan secara merata sampai ke seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat pada wilayah tertentu saja. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi pemerataan pembangunan dan tidak terjadi kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Karena masih banyak daerah di Indonesia yang terpencil dan minim fasilitas publik.

Akibat dari pembangunan yang tidak merata adalah kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kesenjangan tersebut akan menimbulkan kecemburuan antar daerah. Karena daerah yang kurang maju akan merasa tidak diperhatikan dan dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Rasa tersisihkan itu berakibat fatal karena mendorong timbulnya upaya-upaya untuk memisahkan diri yang tentu saja akan mengancam tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu pembangunan yang tidak merata akan mengakibatkan munculnya back wash effect yaitu semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi di suatu daerah karena sebab-sebab diluar tempat itu (Jhinghan, 1993 : 263).

Back wash effect tidak hanya berpengaruh pada daerah yang miskin tetapi juga daerah yang maju. Akibat back wash effect bagi daerah miskin adalah : 1. Daerah yang miskin akan mengalami kesulitan dalam membangun sektor industrinya dan dalam memperluas kesempatan kerja. Penduduk akan berkembang lebih cepat, sehingga pendapatan perkapita penduduk akan semakin rendah dan kemudian diikuti dengan semakin banyaknya pengangguran. 2. Daerah-daerah miskin tersebut akan semakin sulit mengubah struktur ekonomi yang tradisional, sehingga senantiasa akan

bias kearah pertanian. Sedangkan untuk membangun sektor industri dihadapkan pada banyak kesulitan, seperti kurangnya pengusaha yang aktif dan kurangnya tenaga kerja yang terampil, 3. Karena sempitnya kesempatan-kesempatan kerja di daerah miskin tersebut, maka akan terjadi perpindahan tenaga kerja yang masih muda, yang berjiwa dinamis, dan yang mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga yang tinggal di daerah miskin hanya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah (Arsyad, 1999 : 130).

Sedangkan untuk daerah yang maju back wash effect memberikan kesulitan 1. Karena daerah tersebut harus menampung penduduk dari daerah-daerah miskin maka lama kelamaan daerah setempat untuk menciptakan sarana public yang dibutuhkan oleh masyarakat, 2. Daerah-daerah ini akan terjadi maslaah-masalah social akibat dari perkembangannya, seperti masalah polusi, kerawanan keamanan dan lain sebagainya.

Mengetahui betapa pentingnya pemerataan pembangunan, maka pemerintah mengatasinya dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan desentralisasi dan otonomi daerah selain pembangunan dapat lebih merata, potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah juga akan dimanfaatkan secara maksimal dan pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih oleh pemerintah pusat. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 BAB III mengenai Pembagian Urusan Pemerintah yang mengatur mengenai Kewenangan Daerah dijabarkan dalam pasal 10 bahwa : 1. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal dan agama, 2. Kewenangan dibidang lain, sebagaimana disebutkan pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan

pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversi dan standarisasi nasional.

Selain keuntungan yang diperoleh dengan otonomi, daerah juga mendapatkan tantangan tersendiri. Pemerintah daerah juga tertantang untuk dapat melaksanakan pembangunan di daerahnya dengan baik. Pemerintah daerah harus bisa membuat perencanaan pembangunan di daerahnya dengan baik. Pemerintah daerah harus bisa membuat perencanaan pembangunan yang merupakan bagian paling penting dalam pembangunan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan yang ada di daerahnya. Perencanaan pembangunan tersebut harus kreatif sehingga dapat meningkatkan potensi daerah tersebut baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan perencanaan, pembangunan akan dapat berjalan dengan lebih teratur dan terarah. (Tjokroamidjojo, 1985 : 11). Karena itulah mustahil pembangunan akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu perencanaan terlebih dahulu.

Pembangunan dan pengembangan adalah dua hal yang sangat berhubungan erat. Pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada, sedangkan pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada (Jayadinata, 1994:4). Pengembangan wilayah adalah suatu usaha yang terencana untuk memajukan atau meningkatkan atau memperbaiki suatu wilayah dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman muncul berbagai macam masalah, khususnya di daerah perkotaan, seperti : 1).Jumlah penduduk yang semakin meningkat. 2).Kemacetan lalu lintas. 3). Munculnya perumahan-perumahan kumuh. 4).Pengerusakan terhadap

lingkungan, polusi, limbah industri. 5).Fasilitas, prasarana, sarana kota yang semakin terbatas. 6). Semakin langkanya lahan yang tersedia karena diperebutkan oleh sektor industri dan sektor perumahan (Gani, 1994:19).

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan perencanaan kota, yaitu melalui perencanaan tata ruang kota yang baik. Mengenai alternatif mengatasi masalah kota yang selain dengan mengurangi tekanan penduduk di kota dengan mengendalikan migrasi dan menyarankan tingkat kelahiran yang rendah juga dengan melakukan manajemen kota yang lebih baik (Jayadinata, 1999 : 213).

Kota, dengan berbagai permasalahannya tidak mungkin dibiarkan berkembang dengan sendirinya tanpa ada perencanaan. Oleh sebab itu perencanaan kota sangatlah dibutuhkan untuk mengatasi masalah perkotaan, meningkatkan potensi kota, yang akan mengembangkan kota tersebut dan juga merangsang perkembangan daerah lain yang ada disekitarnya.

Bojonegoro yang merupakan salah satu wilayah kabupaten di Jawa Timur, sejak otonomi daerah efektif dilaksanakan tahun 2001, Kabupaten Bojonegoro giat melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan, diperlukan dana yang besar untuk mencapai tujuan dari pembangunan tersebut. Modal tersebut berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sebagai daerah kecil, Bojonegoro mempunyai potensi yang bagus sebagai penunjang pembangunan. Hutan jati yang dimiliki oleh daerah Bojonegoro menjadikan berdirinya banyak meubel di daerah tersebut. Selain itu, akhir-akhir ini di daerah Bojonegoro ditemukan sumur minyak yang tentu saja akan banyak mengundang investor.

Dengan potensi yang dimiliki daerah Bojonegoro maka tidak mustahil ini akan berkembang pesat menjadi kota yang maju. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang baik untuk

mengatur wilayah Bojonegoro agar perkembangannya menjadi kota yang teratur, terarah dan tertata secara rapi.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bojonegoro dengan situs penelitiannya adalah kantor BPPEDA Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan tahap-tahap pembuatan perencanaan tata ruang kota Bojonegoro

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro dengan satu variabel bebas yaitu perencanaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Bojonegoro melalui perencanaan pembangunan wilayah melalui rencana tata ruang kota yang meliputi penetapan pemanfaatan ruang kota, penyediaan dan peningkatan fasilitas umum dan perencanaan transportasi. Fokus yang kedua adalah mengetahui dan menggambarkan tahap-tahap perencanaan tata ruang kota (RTRK) Bojonegoro.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data berkaitan dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah kota Bojonegoro, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Penetapan Fungsi dan Peran Wilayah Kota

Berkaitan dengan pengembangan wilayah kota, maka perlu ditetapkan kebijakan fungsi dari masing-masing wilayah kota Bojonegoro berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah perencanaan. Dengan mengetahui fungsi dari masing-masing wilayah tersebut, maka pengembangan wilayah akan lebih merata sesuai dengan pengelolaannya. Sehingga

dapat menciptakan keseimbangan pertumbuhan antara wilayah serta dapat menciptakan keseimbangan pertumbuhan antara wilayah serta dapat memacu berkembangnya sektor produksi, distribusi dan pelayanan.

Dalam concentric zone theory, oleh E.W Burgess dalam Koestor (2001:30) dikemukakan bahwa kota itu memekarkan diri bermula dari pusat aslinya, sehingga dengan datangnya pertambahan penduduk nantinya secara bertahap meluas ke wilayah-wilayah terpijan keluar, memberikan struktur bergelang mengikuti aliran air. Suatu kota dapat memekarkan diri secara bertahap meluas ke wilayah-wilayah terpijan keluar membentuk struktur bergelang.

Kriteria yang digunakan kota Bojonegoro dalam menentukan fungsi dari masing-masing wilayah sudah cukup kompresensif dan meliputi banyak aspek. Untuk BWK A yang merupakan pusat kota, kegiatan yang paling utama pada wilayah ini adalah sebagai pelayanan pemerintah, sosial, perdagangan lokal dan pemukiman. Penempatan pusat-pusat pelayanan di pusat kota dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan menekankan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan dan disertai penyediaan fasilitas-fasilitas dan peningkatan mutu pelayanan.

Pada BWK B dengan jarak yang dekat dengan pusat kota (BWK A) menyebabkan kawasan ini berkembang pesat, baik untuk permukiman, pendidikan, industri, perdagangan lokal maupun pertanian. Dengan dikembangkannya kawasan pendidikan dan industri memungkinkan kawasan ini berkembang dengan baik. Di wilayah BWK ini juga terdapat tempat-tempat pembelanjaan sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan untuk daerah pertanian yang ada di BWK B terdapat di daerah pacul, Jetak Sumbang dan Mojokampung dengan hasil yang baik karena tanah di daerah tersebut subur.

Sedangkan untuk BWK C dikembangkan sebagai kawasan pendidikan

dan industri sehingga memunculkan kawasan pemukiman. Potensi pertanian di BWK ini juga berkembang karena tanahnya yang subur di daerah Campurejo, Mulyoagung, Semanding dan Kalirejo dengan lahan pertanian yang luas.

Pada BWK D dikembangkan sebagai pelayan kesehatan, pemukiman, industri dan transportasi. Dengan adanya terminal baru di daerah ini akan menjadi magnet pertumbuhan kawasan ini, yang akan meningkat industri rokok di BWK ini. Dengan tingkat pertumbuhan yang cukup bagus di kawasan ini menyebabkan berkembangnya kawasan pemukiman.

BWK E dikembangkan sebagai pelayan distributor kebutuhan pangan/kebutuhan di sektor pertanian. Karena di daerah ini sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Di wilayah ini juga disebarkan kegiatan pendidikan untuk pemerataan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menuntut ilmu.

Pembagian wilayah kota Bojonegoro atas 5 BWK berdasarkan potensi yang dimiliki, merupakan salah satu cara pendekatan proses rencana pembangunan kota. Dalam pengaturan penggunaan tanah perlu mempertimbangkan segala aspek yang ada sehingga bagian wilayah kota dapat tertata dengan baik sesuai dengan fungsi dari masing-masing wilayah.

## 2. Perencanaan Kawasan Perumahan/ Pemukiman

Perumahan memegang peranan fisik yang sangat besar dari lingkungan buatan dan memonopoli sebagian besar ruang perkotaan. Pembangunan perumahan akan menentukan bentuk dan struktur kota yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perkembangan kota. Sehingga masalah lokasi pengembangan perumahan terutama bagi pembangunan perumahan baru perlu diperhitungkan guna menunjang usaha pengembangan kota.

Adanya jumlah penduduk yang semakin meningkat terutama di BWK A, maka pengembangan kawasan perumahan baru di arahkan ke wilayah yang memiliki

lahan tak terbangun masih luas seperti pada BWK D dan E. BWK D dan E ini sangat potensial untuk kawasan pengembangan perumahan baru karena daerahnya yang relatif datar, wilayah yang belum terbangun masih luas dan memiliki akseptibilitas yang cukup baik.

Selain usaha pengembangan perumahan baru, usaha pengembangan perumahan juga dilakukan dengan fasilitas lingkungan perumahan terutama di kawasan dengan kondisi buruk yaitu di sebagian BWK B karena kawasan tersebut berada di pinggir Sungai Bengawan Solo dan kalau musim penghujan akan terjadi banjir. Usaha tersebut secara alami akan menarik motivasi penduduk untuk tinggal di kawasan tersebut dan kedepannya diharapkan akan menarik penduduk agar tidak terlalu padat di pusat kota. Pengembangan pemukiman di wilayah yang belum padat penduduknya akan menciptakan embrio pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru yang akan sangat penting dalam rangka membina pemerataan pembangunan daerah. (Jayadinata, 1999:198)

## 3. Perencanaan Kawasan Pemerintahan dan Bangunan Umum

Fasilitas pelayanan administrasi pemerintah seperti kantor Kecamatan, Kelurahan tetap di pertahankan pada lokasi yang ada, tetapi untuk pembangunan kantor pemerintahan yang baru akan lebih baik jika dibangun pada satu kawasan tertentu agar pelayanan administrasi pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien.

Sedangkan untuk bangunan umum seperti bangunan tempat kegiatan sosial, budaya dan rekreasi, perencanaan pembangunannya di sebarakan keseluruh kawasan pemukiman yang telah ada. Hal tersebut merupakan salah satu usaha untuk pemerataan pembangunan dan untuk meningkatkan kemajuan wilayah sub pusat kota.

## 4. Perencanaan Kawasan Perdagangan dan Perbelanjaan

Perdagangan merupakan salah satu pendukung perekonomian kota. Apabila suatu kota perdagangannya berkembang

dengan baik maka dapat mendukung pertumbuhan kota. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa kegiatan perdagangan di kota Bojonegoro tidak hanya di pusat kota saja tetapi telah menyebar di hampir seluruh wilayah kota. Hanya saja di pusat kota intensitas perdagangan dan jasa lebih tinggi bila dibandingkan dengan wilayah yang lain.

Pengembangan di wilayah perdagangan dan jasa selain dikembangkan di pusat kota juga dikembangkan di daerah-daerah yang padat penduduknya atau daerah perumahan/pemukiman baru. Sedangkan untuk jenis pedagang kaki lima yang banyak tersebar di kota Bojonegoro akan diadakan penetapan terhadap tempat-tempat yang dilarang dan tempat yang diperbolehkan untuk berdagang. Untuk itu pemerintah Bojonegoro berencana membangun sentra pedagang kaki lima yang rencananya akan menempati daerah sekitar terminal baru.

#### 5. Perencanaan Kawasan Industri dan Pergudangan

Industri merupakan salah satu usaha yang perlu dibina dan dikembangkan untuk mendukung perekonomian kota. Apabila industri dapat berjalan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat sekitar akan meningkat khususnya bagi industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Kawasan pergudangan yang berfungsi sebagai sarana penyimpanan barangan dan areal bonkar muat barang-barang distribusi dan konsumsi yang diangkut dari/antar kota atau sebaliknya.

Kegiatan industri dan pergudangan yang merupakan penunjang kegiatan pusat pelayanan memerlukan tingkat kemudahan pencapaian yang tinggi terhadap berbagai lokasi kegiatan, yaitu berupa sarana transportasi seperti terminal, baik untuk pelayanan skala lokal maupun regional ditempatkan di BWK C dan BWK D.

Pembangunan industri harus disebarakan ke daerah-daerah secara merata. Pelaksanaannya ialah dengan mengembangkan prasarana yang cukup baik di daerah-daerah, antara lain dengan membangun wilayah-wilayah industri yang

harus disesuaikan dengan sistem kota yang akan dibentuk, spesialisasi masing-masing kota dalam hubungannya dengan jenis industrinya yang berhubungan dengan potensi dan sumber daya alam.

#### 6. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau meliputi kawasan rekreasi terbuka, taman dan tempat olah raga. Ruang terbuka hijau ini selain untuk tempat rekreasi dan olah raga juga berfungsi sebagai penyejuk kota atau paru-paru kota, mengingat udara kota Bojonegoro yang sangat panas. Dan untuk pengembangannya, ruang terbuka hijau ini akan dibangun di tiap-tiap BWK. Perencanaan ruang terbuka hijau sangatlah penting untuk menjamin kondisi kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan ketenangan masyarakat, sehingga perencanaan pengembangan kota harus memperhatikan lingkungan alam sekitarnya.

Yang termasuk kawasan khusus adalah pompa bensin, makam, jalur hijau dan industri. Untuk pengembangan jalur hijau didasarkan pada daerah sepanjang jalan aliran sungai sebagai pengembangan rekreasi terbuka dan daerah serapan. Untuk makam, pengembangannya memerlukan lokasi yang berorientasi ke pinggiran kota. Sedangkan pengembangan lokasi pompa bensin ditetapkan pada jalan utama yang dapat dicapai dengan mudah dari segala arah. Lokasi pompa bensin ini akan lebih baik jika ditempatkan di tiap-tiap BWK untuk lebih memudahkan pelayanannya terhadap masyarakat.

#### 7. Perencanaan Utilitas Kota

Utilitas kota merupakan aspek perkotaan yang memberi kelengkapan bagi kota. Kelengkapan kota merupakan salah satu daya tarik yang cukup kuat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial lainnya. Penanganan utilitas pada dasarnya perlu dilakukan secara terpadu, karena banyak berkaitan dengan masalah pemeliharaan lingkungan.

#### 8. Listrik

Sebagai sumber penerangan, sebagian besar masyarakat Bojonegoro telah memanfaatkan listrik dari PLN. Produksi

listrik yang dihasilkan oleh PLN meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pelanggan dan luas jaringan jalan pelayanan. Berdasarkan data yang ada hampir seluruh bagian kota Bojonegoro telah terjangkau oleh pelayanan jaringan listrik. Sehingga hampir seluruh masyarakat kota telah memanfaatkan fasilitas listrik dari PLN. Tetapi perlu diperhatikan bahwa PLN masih perlu meningkatkan lagi mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Penambahan kapasitas listrik ditujukan untuk mencapai standart kebutuhan yang layak, demikian juga dengan penambahan jaringan-jaringan baru harus disesuaikan dengan perkembangan kota baik untuk perumahan, perdagangan, industri dan lain-lain. (Ilhami,1990:63)

#### 9. Air Bersih

Sebagian besar kebutuhan air bersih masyarakat Bojonegoro telah dipenuhi oleh PDAM Bojonegoro dengan adanya jaringan air bersih di seluruh wilayah kota Bojonegoro. Walaupun demikian PDAM Bojonegoro harus terus meningkatkan mutu pelayanannya agar pelayanan air bersih dapat merata diseluruh BWK. Agar pelayanan air bersih dapat lebih efektif dan efisien, maka dalam pengembangan jaringan perpipaan perlu diperhatikan persyaratan-persyaratan teknisnya dan adanya program-program pengontrolan kebocoran pipa.

Dalam penyediaan air bersih yang perlu diperhatikan adalah perluasan atau penambahan jaringan saluran air bersih seseuai dengan perluasan wilayah kota, baik untuk daerah perumahan, perdagangan maupun industri.

#### 10. Telepon

Telepon merupakan sarana komunikasi yang sangat penting dan dapat menjangkau daerah yang luas. Pada umumnya jaringan telepon yang ada di kota Bojonegoro telah menjangkau seluruh bagian kota. Jaringan dari Telkom sendiri meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pelanggan dan luas jangkauan pelayanan. Telkom sendiri harus meningkatkan kualitas pelayannya kepada masyarakat karena banyaknya keluhan masyarakat

terhadap mutu pelayanan Telkom yang kurang baik. Terutama bagi fasilitas telepon umum yang kondisinya cukup menyedihkan di kota Bojonegoro.

#### 11. Jaringan Drainase dan Air Limbah

Sistem drainase yang ada di kota Bojonegoro sudah cukup baik dan pemerintah daerah Bojonegoro telah melakukan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal itu terbukti dari kota Bojonegoro yang dulunya dikenal sebagai kota banjir sekarang sudah jarang terjadi banjir. Namun jaringan drainase tersebut harus lebih ditingkatkan lagi karena pada musim penghujan di kota Bojonegoro sering terjadi genangan air sementara di daerah-daerah rawan banjir seperti Jeta, Mojokampung, Kadipaten, Karangpacar, Banjarejo dan Ledok Kulon. Genangan air itu terjadi karena tersumbatnya saluran oleh banyaknya sampah atau saluran tersebut memang jelak kualitasnya sehingga air hujan tidak bisa mengalir dengan baik.

#### 12. Sampah

Di kota Bojonegoro, masalah penanganan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan kegiatan lainnya seperti perkaantoran dan pasar, sudah terkoordinasi oleh Dinas Kebersihan kota yang sudah mempersiapkan cara pengelolaan sampah, Adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di dalam kota pada masing-masing BWK dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada diluar wilayah perencanaan, serta jumlah pasukan kuning yang mendukung penanganan sampah di kota Bojonegoro.

#### 13. Perencanaan Transportasi

Transportasi mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu untuk memajukan perkembangan ekonomi yang tinggi di kota Bojonegoro, keadaan sarana dan prasarana transportasi perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi.

Perencanaan transportasi pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan lalu lintas yang aman dan ekonomis serta menjamin kelancaran sirkulasi lalu lintas antar bagian kota maupun dalam hubungan dengan daerah-daerah sekitarnya dan juga

menunjang kelancaran distribusi dan jasa yang meliputi pengembangan jaringan jalan, peningkatan kualitas jaringan jalan dan pengembangan jalur angkutan umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad L., 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta; BPFE
- Bryant. C, White G.L, 1989. Manajemen Pembangunan, Jakarta; LP3ES
- Catanese, A. dan Snyder, J.C, 1992. Perencanaan Kota, Jakarta; Erlangga
- Gani, Abd. Y.A, 1992. Beberapa Masalah Dalam Pemerintahan Kota, Malang; BPP FIA Unibraw
- Gani, Abd. Y.A, 1994. Manajemen Pemerintah Kota Masalah dan Prospek, Malang; BPP FIA Unibraw
- Ilhami, 1990. Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Srabaya; PT. Usaha Nasional
- Jayadinata, J.T., 1999. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, Bandung; ITB
- Jhingan, M.L., 1993. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta; PT. Grafindo Perkasa
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1986
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta; PT. Pustaka CIDESINDO
- Koentjaraningrat, 1995. Metodologi Penelitian Masyarakat, Jakarta; UI
- Koestoer, R.D.dkk, 2001. Dimensi Keruangan Kota. Jakarta; UI
- Mertokusumo, S. Dkk, 1994. Hukum dan Politik Agraria, Jakarta; Universitas Terbuka, DEPDIKBUD
- Miles, M.B dan A. Michael, H., 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta; UI
- Moleong, L.J., 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; PT. Remaja Rosda Karya
- Parlindungan, A.P., 1993. Komentar Atas UU Penataan Ruang, Bandung; CV. Mandar Maju
- PROPERNAS 2000-2004, Jakarta; Sinar Grafika
- Riyadi, 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- RTRK Kabupaten Bojonegoro, 2004-2014
- Siagian, Sondang, 1995. Administrasi Pembangunan, Jakarta; PT. Toko Gunung Agung
- Tarigan, Robinson, 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta; PT. Bumi Aksara
- Tjokroamidjodjo, B., 1985. Perencanaan Pembangunan, Jakarta; PT. Gunung Agung
- Usman, H dan Akbar, P., 2001. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta; PT Bumi Aksara
- UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Jakarta; CV. Eka Jaya
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta; Komisi Pemilihan Umum